



STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PNPM MANDIRI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO

Alif Y. Walenta

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sintuwu Maroso, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel

Kata Kunci:

Strategi, Pemberdayaan Masyarakat

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana strategi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data primer yang diperoleh adalah dari hasil wawancara mendalam dan informasi jawaban quisioner. Sedangkan untuk data sekunder metode pengumpulan datanya dilakukan selain melalui studi pustaka, juga melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) strategi yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan pembelajaran di masyarakat, secara umum dapat dikatakan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan program PNPM itu sendiri; (2) strategi yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan prinsip partisipatif, walaupun sebagian besar responden mengatakan sudah di jalankan dengan baik, namun tidak dapat di pungkiri bahwa masih ada juga responden yang mengatakan bahwa strategi yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan prinsip partisipatif di maksud belum di jalankan secara optimal; (3) Faktor gaya kepemimpinan di nilai sebagai faktor yang mempengaruhi strategi pelaksanaan program PNPM Mandiri Kecamatan Pamona Selatan.

Kesimpulan dan saran : (1) strategi yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan pembelajaran di masyarakat, belum di jalankan secara optimal. Olehnya di sarankan; Hendaknya strategi yang terkait dengan upaya peningkatan kemampuan masyarakat di dalam pembuatan usulan (proposal) kegiatan, dapat di jalankan oleh pelaksana PNPM (tiap tahun anggaran) agar masyarakat sebagai sasaran program PNPM dapat mengetahui dan memahaminya untuk kemudian dapat melakukan pencarian, mengusahakan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan kepada mereka. (2) strategi yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan prinsip partisipatif, sudah di jalankan dengan baik. Namun demikian masih harus di tingkatkan lagi. Olehnya di sarankan : Pelaksana PNPM Mandiri Kecamatan lebih intens memberikan informasi kepada masyarakat, agar apa yang telah di capai maupun yang belum tercapai dari program-program PNPM yang sudah di laksanakan, di ketahui oleh seluruh masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan program PNPM itu sendiri.

© 2013 Universitas Sintuwu Maroso

Alamat Korespondensi:
Kampus Universitas Sintuwu Maroso, Poso, 94619
E-mail : fisip@unsimar.ac.id

ISSN 2354-659X

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, telah melakukan berbagai upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Salah satu diantaranya ialah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PNPM-MP adalah termasuk dari sekian banyak proyek penanggulangan kemiskinan di era multi krisis yang diintrodusir pemerintah melalui fasilitas Bank Dunia.

Sehubungan dengan itu, maka dikeluarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan secara sistimatis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat sehingga terbentuklah program organisasi masyarakat yang memiliki visi dan misi untuk pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Selanjutnya, perpres tersebut di tindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRANII/2007, tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Inti kegiatan PNPM Mandiri di masyarakat kelurahan/ desa adalah proses menumbuh kembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran dan pelembagaan.

Visi PNPM-MP adalah terwujudnya masyarakat madani yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif dan lestari. Sedangkan Misi PNPM-MP, membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Berpijak pada keyakinan dasar tersebut, PNPM-MP mengembangkan konsep penanggulangan kemiskinan di Pedesaan secara konfrehensif dan utuh dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui proses transformasi sosial dari kondisi masyarakat miskin menjadi kondisi yang mandiri, dengan harapan

akhirnya terbangun masyarakat madani. Konsep PNPM-MP adalah juga untuk menanggulangi adanya kesenjangan gender dalam masyarakat. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, sosial, dan bidang lainnya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan, serta menambah kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, adil dan tanpa adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Pamona Selatan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan PNPM Mandiri, juga merupakan bagian yang menjadi sasaran pelaksanaan PNPM Mandiri di dalam penanggulangan kemiskinan secara konfrehensif dan utuh dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui proses transformasi sosial dari kondisi masyarakat miskin menjadi kondisi yang mandiri. Adapun program yang di tawarkan oleh PNPM Mandiri pada masyarakat pedesaan yang ada di wilayah kecamatan bersangkutan, adalah;

a) Bidang Ekonomi.

Selain memberikan peningkatan kapasitas bagi warga dan pemerintahan lokal, serta dana stimulan untuk mendukung perbaikan prasarana dan sarana dasar di Pedesaan, PNPM Mandiri juga memfasilitasi penyaluran dana pinjaman bergulir bagi masyarakat dalam skala mikro (*micro finance*). Selain itu, pendanaan mikro dalam program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air ini juga dikelola sendiri oleh masyarakat.

Pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan ini dimaksudkan untuk membuka usaha maupun menambah modal usaha masyarakat dengan mudah dan nyaman. Setiap anggota (secara berkelompok) dan tiap RT di lokasi program, memiliki kesempatan untuk memperoleh modal tambahan dengan memanfaatkannya. Caranya, kelompok ini hanya perlu mengajukan proposal melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang ada di setiap kecamatan lokasi program. Masyarakat melalui Tim Verifikasi di kecamatan kemudian akan melakukan verifikasi dan bermusyawarah untuk menilai kelayakan proposal-proposal. Proposal yang layak, disetujui untuk mendapatkan pendanaan. Sumber dana bisa dari perguliran pinjaman yang dikelola UPK atau dari BLM.

b) Bidang Lingkungan.

Yakni, upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik. Dalam pelaksanaan kegiatan botanisasi jalan merupakan bagian dari kegiatan lingkungan dana bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL) yang tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana saja, namun juga mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. Program di bidang lingkungan ini antara lain;

- Pembangunan jalan setapak (Botanisasi)
- Saluran pembuangan air yang kurang berfungsi dengan baik.
- Masih terdapatnya rumah warga yang kurang layak huni.

Untuk itu, UPL di perkenankan dan diharapkan memperkuat kapasitas pelayanan kepada masyarakat miskin dengan melakukan berbagai diversifikasi yang tepat bagi masyarakat miskin dengan melakukan berbagai diversifikasi pelayanan dana bergulir yang tepat bagi masyarakat miskin diwilayahnya.

c. Bidang Sosial.

Yaitu, program yang di peruntukan yang berkenaan dengan perumahan, kesehatan fisik, pendidikan dan lain sebagainya. Tujuan utama melibatkan masyarakat dalam program ini adalah untuk mencocokkan sebesar mungkin kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat agar dalam pelaksanaannya lebih efektif.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada objek yang akan di teliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang sudah di tawarkan oleh PNPM Mandiri tersebut di atas, belum di tunjang dengan strategi yang baik sehingga upaya pemberdayaan masyarakat - yang merupakan bagian dari prinsip dasar PNPM Mandiri - yang sudah di lakukan selama ini belum optimal. Kurangnya kemampuan masyarakat di dalam memahami kebutuhan dan potensinya untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri, adalah gambaran yang menunjukkan masih lemahnya strategi pelaksana PNPM Mandiri Kecamatan Pamona Selatan di dalam memberdayakan masyarakat. Akibatnya, upaya pemberdayaan masyarakat - yang merupakan bagian dari prinsip dasar pelaksanaan PNPM

Mandiri - di Kecamatan Pamona Selatan yang sudah di lakukan oleh PNPM selama ini, di nilai belum optimal.

Berangkat dari latar belakang masalah itulah, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi pelaksanaan PNPM Mandiri dengan mengangkat judul utama : “Strategi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso “.

Adapun yang menjadi fokus penelitian, peneliti hanya akan mengfokuskan pada beberapa aspek yang terkait dengan strategi pelaksanaan PNPM Mandiri, diantaranya; aspek strategi meningkatkan kemampuan pembelajaran masyarakat dan aspek strategi penerapan prinsip transparansi dan partisipatif.

Bertolak dari hal tersebut serta untuk mengetahui secara komprehensif mengenai strategi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso, maka pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut;

Bagaimana strategi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pamona Selatan ?

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pamona Selatan ?

TUJUAN

Tujuan Umum PNPM, adalah; meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Tujuan Khusus PNPM, adalah;

Meningkatnya partisipasi seluruh dari berbagai unsur masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat.
- Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan,

program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (keberpihakan pada kemiskinan).

- Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
- Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan diwilayahnya.
- Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat .

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian "proses" menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan menunjuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna "memperoleh" daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata "memperoleh" mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/

kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perinya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan.

Makna kata "pemberian" menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/ kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka (dalam Soetrisno, 2001;80) menyatakan bahwa; pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survai pada awalnya. Selanjutnya untuk *cross check* dan melengkapi data, maka dilakukan teknik wawancara dan penyebaran kuisioner terhadap para informan dan responden yang dipilih.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah bagaimana strategi pelaksanaan program PNPM Mandiri dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi strategi pelaksanaan program PNPM Mandiri dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso tersebut.

Berkaitan dengan populasi, maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Ketua/ dan seluruh anggota PNPM Mandiri yang ada di Kecamatan Pamona Selatan yang berjumlah 11 orang di tambah 24 orang unsur pemerintah desa dan 250 orang anggota kelompok PNPM yang berada di desa. Jadi jumlah keseluruhan populasi adalah 285 orang. Sedangkan yang akan di jadikan sampel dalam penelitian ini, masing-masing;

Ketua/ Fasilitator	= 1 Orang;
Unsur pemerintah desa	= 12 Orang;
Anggota PNPM Mandiri	= 27 Orang;
Jumlah	= 40 Orang.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah kuesioner, wawancara, dan observasi.

Data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan segala peristiwa atau kejadian yang ada pada objek penelitian secara apa adanya tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan lainnya.

dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif di maksud.

2. Strategi : Penerapan Prinsip Transparansi & Prinsip Partisipatif.

Yang di maksud dengan penerapan prinsip transparansi (keterbukaan), adalah; adanya informasi yang mudah di dapatkan oleh masyarakat terkait dengan capaian dari masing-masing program yang sudah di laksanakan oleh pelaksana PNPM Mandiri Kecamatan Pamona Selatan. Selanjutnya, yang di maksud dengan penerapan prinsip partisipatif (keikutsertaan), adalah; adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan/ pengambilan keputusan. Kedua kegiatan seperti ini, di nilai sebagai bagian dari strategi untuk mendorong intensitas pelaksana PNPM Mandiri Kecamatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh unsur masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan dalam kegiatan perencanaan/ pengambilan keputusan, agar apa yang menjadi tujuan utama dari pada pelaksanaan program PNPM Mandiri itu sendiri, dapat di capai secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pelaksanaan Program PNPM Mandiri.

1. Strategi: Peningkatan Kemampuan Pembelajaran di Masyarakat.

Yang dimaksud dengan peningkatan kemampuan pembelajaran dimasyarakat, adalah; suatu rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh pelaksana program PNPM Mandiri Kecamatan Pamona Selatan untuk (a) mendorong kemampuan masyarakat di dalam menulis usulan (proposal) dan (b) mendorong kemampuan pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif, melalui pelatihan-pelatihan. Kedua kegiatan seperti ini, di nilai sebagai bagian dari strategi untuk memberdayakan masyarakat yang masih miskin agar mereka bisa lebih mandiri dan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di ketahui bahwa strategi pelaksanaan program PNPM yang berkaitan dengan kegiatan pemberian pembelajaran mengenai cara pembuatan usulan kegiatan (proposal) kepada masyarakat, belum sepenuhnya menyentuh masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan program PNPM itu sendiri. Selanjutnya, strategi yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif, sesungguhnya sudah di jalankan, namun belum tuntas. Dari 12 desa yang ada di wilayah kerja PNPM Mandiri Kecamatan Pamona Selatan, baru 4 desa yang sudah pernah di berikan pelatihan oleh pelaksana program PNPM Mandiri terkait dengan upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di ketahui bahwa strategi pelaksanaan program PNPM yang berkaitan dengan upaya memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat tentang capaian dari masing-masing program yang sudah di laksanakan oleh pelaksana PNPM Mandiri, sudah di jalankan secara maksimal. Selanjutnya, strategi pelaksanaan program PNPM yang berkaitan dengan penerapan prinsip partisipatif (melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan/ pengambilan keputusan), juga sudah di laksanakan dengan baik. Namun tidak dapat di pungkiri bahwa masih ada responden yang mengatakan strategi seperti ini belum sepenuhnya di lakukan secara maksimal.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pelaksanaan Program PNPM Mandiri

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai strategi pelaksanaan program PNPM dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pamona Selatan, di ketahui bahwa strategi yang terkait dengan pemberian pembelajaran (pelatihan) pembuatan penyusunan usulan (proposal) kepada masyarakat dan strategi untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif, belum di jalankan secara maksimal.

Selanjutnya, walaupun secara umum strategi yang terkait dengan penerapan prinsip transparansi (keterbukaan) dan partisipatif oleh pelaksana PNPM Mandiri Kecamatan Pamona Selatan sudah di jalankan dengan baik, namun tidak dapat di pungkiri bahwa masih ada responden yang mengatakan strategi seperti ini belum sepenuhnya di lakukan secara maksimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dari hasil observasi di lapangan, di ketahui bahwa; factor yang mempengaruhi sehingga strategi pelaksanaan program PNPM dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pamona Selatan belum berjalan secara maksimal, antara lain di karenakan oleh faktor gaya kepemimpinan yang di nilai kurang konsultatif (khususnya sesama pengurus), juga di nilai kurang transparan alias tidak demokratis. Akibatnya, hubungan antara yang memimpin dan yang di pimpin menjadi kurang kondusif. Situasi seperti ini sesungguhnya hanya memberi dampak kurang baik terhadap pencapaian program PNPM Kecamatan pada khususnya dan pencapaian program pemberdayaan masyarakat pada umumnya.

KESIMPULAN

(1) strategi yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan pembelajaran di masyarakat, belum di jalankan secara optimal.

(2) strategi yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan prinsip partisipatif, sudah di jalankan dengan baik. Namun demikian masih harus di tingkatkan lagi.

SARAN

- Hendaknya strategi yang terkait dengan upaya peningkatan kemampuan masyarakat di dalam pembuatan usulan (proposal) kegiatan, dapat di jalankan oleh pelaksana PNPM (tiap tahun

anggaran) agar masyarakat sebagai sasaran program PNPM dapat mengetahui dan memahaminya untuk kemudian dapat melakukan pencarian, mengusahakan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan kepada mereka.

- Demikian halnya dengan strategi yang terkait dengan upaya peningkatan kemampuan pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif. Hendaknya strategi seperti ini dapat di lakukan oleh pelaksana PNPM secara kontinyu (tiap tahun anggaran) agar pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif, dapat meningkat terus.
- Pelaksana PNPM Mandiri Kecamatan lebih intens memberikan informasi kepada masyarakat, agar apa yang telah di capai maupun yang belum tercapai dari program-program PNPM yang sudah di laksanakan, di ketahui oleh seluruh masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan program PNPM itu sendiri.
- Demikian halnya dengan strategi penerapan prinsip partisipatif. Hendaknya strategi seperti ini dapat di lakukan secara terus menerus oleh PNPM Mandiri Kecamatan agar dalam setiap perencanaan maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program PNPM, masyarakat sendirilah yang menentukannya.
- Guna optimalisasi pelaksanaan program PNPM Kecamatan, hendaknya gaya kepemimpinan konsultatif dan demokratis seorang pimpinan dapat di jalankan sebagaimana yang di harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chitrawati, Buchori, dkk. 2002. *Meningkatkan Partisipasi aktif Perempuan Belajar dan Pengalaman*, Jakarta. World Bank.
- Machdhoero, A.M. 1993. *Metodologi Penelitian*, Malang, UMM Press.
- Mikkelsen, B. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Moeleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.
- Muhadjir, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, P.O Box 83, Yogyakarta.

- Nawawi, Hadari, 2001, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rustandi Ahmad, 1992, Gaya Kepemimpinan, Bandung, CV.Armico.
- Salusu. J, 2006. Pengambilan Keputusan Stratejik. PT. Gramedia Widia Sarana, Jakarta.
- Shirley, Robert, 2000. Strategic Decesion Making in Collegs and Universities. Houston.
- Siagian Sondang P. 1992. Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan. Haji Masagung. Jakarta.
- Soetrisno,R,2001. Pemberdayaan masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung. CV Alfabeta
- Sulistiyani A.T, 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media, Yogyakarta.
- Sumarto, H. 2003. Inovasi Partisipasi dan Good Governance, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2000. Visi dan Misi Pembangunan Dengan Basis Pemberdayaan Masyarakat. Idea, Yogyakarta.
- Sutanto, Blanchard, 1991, Etos Kerja dalam Organisasi, Liberti, Jakarta.
- Syafar Wahid, 2001, Kepemimpinan Teori Gaya dan Analisis, Untad Press, Palu.
- Thoha Mifta, 1990, Kepemimpinan dalam Manajemen, Jakarta Rajawali Press
- Usman, Sunyoto, 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yanti Muchtar, Missiyah. 2005. Modul Pelatihan untuk Menumbuhkan & Meningkatkan Sensitifitas Keadilan Gender, Jakarta.
- Yuniyanti Chuzaifah, dkk. 2005. Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Membangun Perdamaian, Jakarta. Search for Common in Indonesia.
- Tim Penyusunan Pedoman Umum PNPM MANDIRI, 2007. *Pedoman Teknis Pembentukan /Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat*. PNPM mandiri, Jakarta.